

KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA BATUMBALANGO KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN TALAUD

DANDI FRANSISCO MADEA

ALDEN LALOMA

JOORIE RURU

Abstrak:

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program smart city di dinas komunikasi dan informatika Kota Manado.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran tau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu data menyangkut implementasi program smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado

Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi kepala Desa Batumbalan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan berjalan lancar juga komunikasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta instansi terkait lainnya berjalan lancar. Pengambilan keputusan oleh kepala desa dilakukan tidak didasarkan pada mekanisme yang ada yaitu melalui rapat musyawarah mufakat tapi dilakukan sepihak oleh kepala desa bersama perangkatnya dan tidak melibatkan masyarakat

Kata Kunci : Kepemimpinan Partisipatif; Pembangunan

PENDAHULUAN

Di era yang serba dinamis ini perkembangan teknologi dan informasi berperan penting bagi negara yang sedang berkembang terutama di Indonesia oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan harus dapat tuntutan atas kebutuhan dari masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemerintahan harus mengikuti perkembangan sosial masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, berbagai alternatif untuk melaksanakan proses pemerintahan pun mulai bermunculan dan di terapkan di berbagai instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. *Digital Government* (pemerintahan digital) merupakan salah satu sistem pelaksanaan pemerintah yang mulai diterapkan di berbagai negara di dunia

termasuk Indonesia untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pada saat ini di Indonesia sendiri, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 64% perkembangan konsep Digital Government merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan pemanfaatan data.

Perkembangan konsep pemerintahan berbasis teknologi informasi di Indonesia sendiri sudah diupayakan sejak lama. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan mengeluarkan kebijakan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk diterapkan dalam proses pemerintahan dan pelayanan terhadap warga negara atau masyarakat. Beberapa bentuk dukungan dari kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat ataupun daerah akan suatu sistem pemerintahan yang terintegrasi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu peraturan pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang implementasi undang - undang keterbukaan informasi publik.

Dalam perkembangannya reformasi digital upaya pemerintah Indonesia untuk berusaha memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat sistem pemerintahan yang konvensional mendapat kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang efisien dan efektif agar dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, dalam hal ini diperlukan adanya perubahan suatu tata kelola pemerintah dengan mengupayakan untuk mewujudkan reformasi digital pada bidang pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari reformasi tersebut dapat memberikan kemudahan kedepannya bagi masyarakat. Selain itu dengan dijalkannya reformasi digital proses tata kelola pemerintahan digital sebagai solusi alternatif dalam berbagai masalah pemerintahan dan memenuhi tuntutan permasalahan masyarakat yang kompleks secara efisien dan efektif di Indonesia. Reformasi menjadi suatu gerakan yang beriringan dengan upaya pemanfaatan teknologi informasi dengan pemanfaatan Digital Government dalam tata kelola pemerintah kota yang lebih dikenal dengan konsep smart city atau kota cerdas. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi diberbagai perkotaan yang pertumbuhannya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang lebih baik lagi. Untuk itu dimasa reformasi digital ini kemampuan pengawasan yang efisien dalam penerapannya sehingga dapat memecahkan masalah secara cepat dan tepat.

Untuk menciptakan kemandirian dan untuk meningkatkan layanan publik adalah tujuan awal dari penerapan konsep smart city diberbagai kota didunia penerapan dan konsep smart city ini sudah semakin berkembang dan sudah bisa diterima oleh masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dan sudah mulai menerapkan konsep smart city disetiap kota.

Dasar dari peluncuran program ini setelah pemerintah mencermati sejumlah isu

dan tantangan pembangunan daerah perkotaan yang ada di Indonesia. Menurut data BPS 2014, mereka mencatat pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan 2.75% per tahun penduduk Indonesia sudah banyak hidup di kota dibandingkan pedesaan. Setelah melihat ketimpangan perkembangan jumlah penduduk menurut topologi Kota di Indonesia 2005 – 2025, pemerintah lewat Bapenas menjabarkan permasalahan dan tantangan perkotaan dalam framing isu perkotaan multi dinamis yang dikemas dalam kebijakan pengembangan perkotaan nasional.

Pemerintah harus berfokus pada kebijakan dan strategi kekuatan dibalik urbanisasi secara efektif. Caranya dengan membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing 2015 – 2045. Gerakan menuju program 100 smart city merupakan program kementerian komunikasi dan informatika, kementerian dalam negeri, kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Bapenas dan kantor staf kepresidenan. Gerakan tersebut untuk membimbing Kabupaten atau Kota dalam menyusun master plan smart city agar bisa lebih maksimal pemanfaatan teknologinya, baik itu dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan atau memaksimalkan potensi pada masing – masing kota yang ada.

Di Kota Manado sendiri ikut serta dalam gerakan menuju smart city yang merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2015. Manado sendiri pada periode pemerintahan 2016 – 2021 menyusun visi Manado Kota Cerdas 2021, diusungnya visi tersebut berdasarkan visi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Manado tahun 2005 – 2025 dan gambar profil dan isu strategi saat ini di Kota Manado, serta memperhitungkan kondisi yang akan datang. Dengan visi Manado Kota Cerdas 2021, menjadi ulasan yang kuat untuk menerapkan program smart city di Kota Manado.

Dalam upaya mewujudkan visi pemerintah tersebut pemerintah mengajak berbagai akademisi perguruan tinggi baik itu di Sulawesi Utara maupun diluar daerah Sulawesi Utara, pada tahun 2019 pemerintah Kota Manado telah melakukan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui penandatanganan kesepahaman (MOU) dalam rangka pengembangan dan penerapan Manado smart city. Upaya dalam mengimplementasikan smart city Kota Manado diwujudkan melakukan beberapa program pelayanan publik antara lain Cerdas Command Center (C3), portal analisis dan berbasis peta (PANANDA), pajak online terbaru (PONTER) dan Manado Siaga 112 (MS112).

Namun pelaksanaan digital governance di Kota Manado masih menemukan berbagai kendala. Jalannya program masih belum dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat belum mengetahui dan memahami akan pelaksanaan program tersebut. Ketidaktahuan masyarakat tersebut mengakibatkan pengadaan inovasi pelayanan publik beberapa aplikasi yang ada menjadi tidak efektif. Masih kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang menunjang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program digital government. Penggunaan alat – alat berbasis teknologi merupakan kegiatan yang membutuhkan sumber daya financial yang besar dalam pengadaannya, hal ini menjadikan pelaksanaan program belum optimal, disatu sisi kebutuhan akan sumber daya manusia yang menjadi satu masalah, karena kurangnya sumber daya yang terampil dibidang teknologi membuat penerapan program belum maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Elivis Ruru, Florence Daicy Lengkong, Rully Mambo Dengan judul penelitian: Implementasi Program Digital Government Smart City di Kota Manado. Dalam ini bertujuan turtuk mengetahui Implementasi Digital Government smart city

Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan digital government smart city di kota Manado telah berlangsung sejak tahun 2017 mengacu kepada visi kota Manado yakni Manado Kota Cerdas 2021. Pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang pelaksanaan digital government berkonsep smart city di kota Manado.

Pelaksanaan digitat government smart city di kota Manado didapati belum berjalan dengan optimal, beberapa kendala yang menghambat jalannya digital government smart city, di kota Manado diantaranya; Masih minimnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kota Manado dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan aparatur dalam memahami dan melaksanakan program yang ada tidak efektifnya mekanisme sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat dalam memanfaatkan perayanan digitat dari pemerintah metarui program smart city kota Manado, kemudian besarnya anggaran dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi membuat pelaksanaan digital government smart city belum mencakup sernua satuan kerja perangkat daerah di kota Manado selain itu sumber anggaran yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado didapati belum optimal dalam memenuhi penyediaan fasilitas teknologi informasi di dalam lingkungan pemerintah Kota Manado.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebilakan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delover policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan

setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Asustino 2008:195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Eugene Bardach (dalam Agustino, 2008:138) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat suatu program dan kebijakan umum yang kelihatannya diatas kertas. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kegiatan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian kegiatan
3. Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut George C. Edwards III (dalam Dwiyanto 2009:31), implementasi kebijakan mempunyai empat variable, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi, program/ kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tuju dan sasaran.
3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan, program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang diteraui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam atas program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program /kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus Weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program / kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat memengaruhi variabel yang lain. Maka dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu program sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah dalam pencapaian tujuan yaitu kesejahteraan bersama yang bersifat sistematis dan terencana.

Dari teori - teori diatas, dapatlah didefinisikan implementasi kebijakan adalah : upaya yang dilakukan pemerintah, yang bersifat berhasil atau aplikabel untuk menghasilkan output dan outcomes, sesuai yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan Outcome adalah dampak dari kebijakan. yang diharapkan dapat timbul

setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan. " (Indiahono wiyanto, 2009 : 1431.

Pengertian Smart City

Smart city atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari pendekatan smart city untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya. *“The structure of smart city includes perception layer, network layer and application layer, which can make the future world increasingly appreciable and measurable, increasingly interconnection and interoperability and increasingly intelligent”* (struktur dari smart city meliputi lapisan persepsi, lapisan jaringan dan lapisan aplikasi, yang dapat membuat masa depan dunia semakin cukup dan terukur, semakin interkoneksi dan interoperabilitas dan semakin cerdas) (Su, Li, & Fu, 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran tau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2016:15).

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian

sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif merupakan kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu data menyangkut implementasi program smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (i) data primer dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman – rekaman, gambar-gambar, atau foto – foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, grafik - grafik, tabel, model, arsip-arsip atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan dipilih secara sengaja dari beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang judul penelitian yang akan dikaji, sehingga peneliti mengambil informan yakni :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado 1 orang
2. Kepala Bidang Informasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado 1 orang
3. Kepala Instruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado 1 orang
4. Masyarakat 5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Primer di peroleh melalui:
 - a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait mengenai hal-hal yang belum jelas, untuk pelengkap perolehan data informasi. Wawancara merupakan alat utama dalam penelitian deskriptif kualitatif.
 - b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dengan melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang di jumpai di lapangan.
2. Data sekunder diperoleh melalui:
 - a. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah tulisan, buku karangan ilmiah serta peraturan-peraturan perundangan yang relevan dengan penelitian.
 - b. Penelitian lapangan, dimana data di peroleh dengan melakukan studi lapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Nugroho, 2014:121), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi data yang berkenaan dengan proses seleksi, focus. Penyederhanaan absreaksi, dan transformasi data yang muncul dalam catatan penelitian atau transkripsi
2. Penyajian data, yaitu penataan data sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian – penyajian yang dapat kita pahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan penelitian yang sekaligus merupakan verifikasi penelitian dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung, sedangkan verifikasi merupakan suatu kegiatan pemikiran kembali yang melintas pada pemikiran penganalisis selama penelitian mencatat atas suatu tinjauan ulang dilapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program smart city di Kota Manado yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi lapangan menunjukkan bahwa program smart city pada umumnya sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa aspek yang belum maksimal. Program smart city adalah salah satu program yang diterapkan oleh dinas komunikasi dan informatika Kota Manado seperti pemantau kemacetan, banjir dan sebagainya. Maka peneliti akan membahasnya dengan menggunakan pendekatan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Sehubungan dengan interpretasi, maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan program smart city sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antara pelaksana program dan penerima dalam hal ini masyarakat, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, merupakan hal yang sangat penting dan hal itu dilakukan melalui penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti dimana peneliti melihat bahwa semua pelaksana sudah memahami tentang tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing namun kurangnya perhatian dan sikap acuh tak acuh sehingga dalam proses pelaksana

program menjadi lamban misalnya melakukan pemecahan yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program smart city yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan. Karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian diantara aparat pelaksana dalam hal ini fasilitator, tim teknis dan masyarakat sebagai penerima manfaat, disini diperlukan prosedur ataupun petunjuk teknis dari program untuk dijadikan pedoman disaat pada pengimplementasiannya. Dan tanggung jawab dari orang – orang terpaut pada pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

Dari aspek penerapan diketahui bahwa di Dinas sosialisasi tentang program – program dari pemerintah yang ada untuk pemberitahuan kepada masyarakat tapi belum berjalan baik atau belum optimal. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Manado mengenai program smart city ini pada kenyataannya masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang program smart city.

2. Sumber daya

Diketahui bahwa sumberdaya manusia sebagai pelaksana program smart city dibagian tenaga informasi dan teknologi (IT) masih kurang yang artinya tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih kurang sehingga merekrut tenaga honor atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang berlatar belakang pendidikan informatika dan teknologi.

Peneliti melihat mereka hanya mempunyai disetiap divisi 4 sampai 7 orang yaitu divisi programmer 4 orang, divisi jaringan 7 orang, divisi operator 8 orang dan divisi disain 4 orang dan semuanya itu adalah Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga pegawai negeri

sipil hanya 4 orang yang bertanggung jawab dibawah naungan seksi infrastruktur dan teknologi.

Diketahui bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Manado saat ini secara keseluruhan belum menunjukkan profesionalisme kerja baik secara individu maupun secara kolektif. Secara individu ditinjau dari keterampilan dan wawasan, masih banyak PNS yang kurang mahir dalam penggunaan perangkat computer dan belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, kurang mampu dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, serta kurang menguasai aturan yang ada, dari data ASN Kota Manado Tahun 2018 yang berjumlah 5.722 pegawai, sumber daya pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) hanya berjumlah 57 pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesiapan menuju pengembangan Manado Smart City perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan sumber daya pemerintah di bidang TIK melalui perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlatar belakang TIK.

Disamping itu juga berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dilapangan bahwa jumlah peralatan cctv yang telah terpasang berjumlah 130 cctv yang seharusnya dibutuhkan setiap 8 cctv dipegang oleh 1 orang operator untuk maksimalisasi pemanfaatan program ini dibutuhkan setidaknya 25 orang. Fasilitas yang mendukung juga mempengaruhi maksimalnya pemanfaatan peralatan ini karena mereka hanya mempunyai 1 mobil yang digunakan dalam pengawasan dan perbaikan peralatan cctv.

Dari hasil wawancara yang di dapat yang menjadi kendala saat ini juga yaitu kapasitas dari hardisk dan server yang tidak cukup menampung data-data CCTV yang ada sehingga masyarakat sering mengeluh akibat sering errornya aplikasi Sitasya ini dan dari jumlah 130 CCTV itu juga dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi apalagi ada beberapa cctv yang rusak atau sudah tidak berfungsi lagi sehingga masyarakat tidak dapat mengakses perkembangan dari suatu peristiwa atau kejadian.

Dengan ini para informan mengharapkan program smart city ini bisa berguna sesuai dengan fungsi dan tujuan dibuatnya aplikasi ini dari dibuatnya peraturan Walikota No. 10 tahun 2018 tentang Manado smart city yaitu untuk membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga serta untuk memperkuat daya saing dalam hal kenyamanan lingkungan.

3. Disposisi

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti diketahui bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Manado masih perlu untuk lebih ditingkatkan. Hal – hal yang perlu dibenahi terkait dengan pelayanan publik antara lain profesionalisme dan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan yang perlu untuk ditingkatkan, indeks kepuasan masyarakat yang sampai saat ini belum pernah diukur dan belum tersedianya suatu bentuk sistem berbasis IT untuk mengatasi berbagai keluhan masyarakat sehari – hari secara cepa dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa prosedur kerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika sudah jelas pelaksanaannya karena menggunakan peraturan Walikota nomor 45 tahun 2016 tentang struktur organisasi tata kerja Dinas Kominfo namun harus tetap dalam

pengawasan pemerintah. Sehubungan dengan penerapan yang tertuang dalam peraturan Walikota Manado nomor 10 tahun 2018 tentang Manado Smart City menimbang bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola teknologi dan informasi komunikasi (TIK) diperlukan suatu sistem yang strategis dan komprehensif melalui pengembangan Manado Smart City sebagai pedoman peningkatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Manado. Ini tentunya mengarah kepada publik dari pemerintah Kota Manado kepada masyarakat melalui program yang dilaksanakan dan hal tersebut harus didukung pula oleh sikap atau ketegasan pemerintah Kota Manado untuk secara secara bersungguh – sungguh berkomitmen menjalankan peraturan serta program tersebut guna melindungi kepentingan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat Kota Manado.

4. Struktur organisasi / birokrasi

Max Weber (1948) menjelaskan bahwasanya organisasi tersebut memiliki tanggung jawab serta kewenangan dan pembagian kerja bertujuan dalam mengeksekusi fungsi tertentu, ini meliputi kewajiban untuk merancang satuan – satuan organisasi dan pejabat yang harus melaksanakan pekerjaan, memutuskan fungsi – fungsi mereka dan merinci interaksi yang harus ada diantara satuan – satuan dan orang – orang. Suatu struktur yang jelas dalam organisasi sangat diperlukan dalam pengimplementasian suatu program sehingga tenaga para pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya yang berkompeten.

Pentingnya peneliti dalam melihat struktur pelaksana program smart city ini membutuhkan keterlibatan penyuluh dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika serta dari pemerintah Kota Manado sebagai mitra kerja harus yang mampu

bekerja sama dengan baik dan harus terus melakukan monitoring serta evaluasi program. Dalam hal pengorganisasian peneliti melihat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado yang mempunyai visi “Manado Kota Cerdas 2021”. Sangat mempunyai hubungan yang erat untuk mengimplementasikan keputusan peraturan Walikota Manado nomor 10 tahun 2018 tentang smart city.

Sesuai dengan hasil penelitian dan hasil wawancara bahwa pelaksanaan program smart city sepenuhnya dibawah pengawasan dinas komunikasi dan informatika kemudian diketahui struktur organisasi yang ada di Diskominfo telah terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komunikasi kepala Desa Batumbalan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan berjalan lancar juga komunikasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten serta instansi terkait lainnya berjalan lancar
2. Pelaksanaan program pembangunan di desa Batumbalango diatur melalui mekanisme konsultasi mulai dari pemecahan masalah, memilih strategis dan melakukan pembagian tanggung jawab diselesaikan dengan konsultasi
3. Pengambilan keputusan oleh kepala desa dilakukan tidak didasarkan pada mekanisme yang ada yaitu melalui rapat musyawarah mufakat tapi dilakukan sepihak oleh kepala desa bersama perangkatnya dan tidak melibatkan masyarakat
4. Kepala desa batumbalango dalam melaksanakan program pembangunan dengan mendelegasikan kewenangan

membagi kekuasaannya kepada bawahan dalam hal ini perangkat desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya ketika dia tidak berada ditempat

5. Tipe kepemimpinan yang dilakukan kepala desa adalah tipe kepemimpinan demokrasi yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai aspek pembangunan tapi juga subjek pembangunan

Saran

Dari hasil kesimpulan yang ada maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar program pembangunan berjalan lancar dan melibatkan partisipasi masyarakat maka disarankan agar kepala desa terus melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan pemerintah, kecamatan, kabupaten serta instansi lainnya juga masyarakat
2. Dalam memecahkan masalah memilih strategi dan melakukan pembagian tanggung jawab disarankan agar dilakukan melalui mekanisme konsultasi
3. Disarankan kepada kepala desa Batumbalango agar dalam pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dan melibatkan partisipasi masyarakat
4. Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan disarankan kepala desa agar dapat mendelegasikan kewenangan kepada perangkat desa jika kepala desa melakukan tugas luar

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Eka Pratama, ST. MT. I Petu. 2014. *“Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi – Teknologi Pendukung lainnya”*. Bandung Informatika.
- Albari A. H. Gosal, T.A. M.R, Pangemanan, F. N. 2019. *Implementasi Program Cerdas Command Center Dalam Mewujudkan Smart City. (studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 3.(3) journal.unsrat.ac.id.
- Abdul, W, S. 2016, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Keempat. PT Bumi Aksara.
- Bugin, B. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung. Edisi Kedua.
- Bitjoli, B. E. Rindangan., Y. D. Y. Karow., S.D.S. 2017. *”Analisis Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus Pemerintah Kota Manado)”* E-journal teknik informatika. 12 (1). [Http://ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id).
- Dwiyanto, A. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung, Bandar Maju.
- Indrajit, R, E. (2002). *Membangun Aplikasi EGovernment*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Jones, C, O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: Manajemen PR Raja Grafindo Persada..
- Mirnasari, R, M. 2013. *Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih*. Universitas Airlangga.

- Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1 Nomor.1
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Maatoke, F. S. Kaawoan. J. Undap G. 2020. *Implementasi Portal Analisis Data Berbasis Peta (Pananda) Sudi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Manado*. Jurnal Eksekutif 2 (5) ejournal.unsrat.ac.id.
- Mambu, Oletta E. Rindengan, DY, Yaulie, Karouw. Stanley DS. 2016. *Pengembangan Aplikasi E-Report Layanan Masyarakat Untuk Manado Smart City*. Jurnal Teknik Informatika 8 (1) ejournal.unsrat.ac.id
- Nugroho, R. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ruru, E. Lengkong. F. D. Mambo R. 2020. *Implementasi Program Smart City Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik 6. (95) ejournal.unsart.ac.id
- Sangala, R. J. Lengkong, F. D. Kolondam H. 2020. *Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) di Kota Manado*, Jurnal Administrasi publik 6 (96) ejournal.unsrat.ac.id
- Sinambala, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Impelemntasi)* Jakarta Bumi Aksara.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta, UNS.
- Sutrisno, B. Akbar I. 2008. *E-paertisipan dalam pembangunan lokal (study implementasi smart city kota Bandung)*, jurnal sosiotegnoli, 17 (2) ejournal.ac.id
- Widodo N. 2016. *Pengembangan E-Government di Pemerintahan dalam Langka Mewujudkan Smart City (Studi di Daerah Kota Malang)*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP).